

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan digunakan oleh entitas dalam hal ini pemerintah untuk melakukan pertanggung jawaban kinerja keuangan kepada publik. Laporan keuangan yang disajikan tersebut harus mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik: Relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010). Laporan Keuangan dibuat untuk menyajikan informasi yang relevan, andal dan dapat dipercaya berkenaan dengan posisi keuangan dan seluruh data transaksi yang di catat oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang tentang Keuangan Negara, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD dan masyarakat umum. Laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan, selain itu SKPD juga akan menyusun surat pertanggung jawaban (SPJ) yang disusun setiap bulan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan tahunan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan diberlakukannya undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, yang menitik beratkan pada pola transparansi serta akuntabilitas jelas terlihat bahwa pemerintah menginginkan adanya pola penyusunan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah tidak hanya berusaha akan melibatkan semua komponen masyarakat tetapi hasil akhir dari semua itu tertuju untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian diharapkan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna atas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pembangunan didaerahnya. Dalam9- rangka pertanggung jawaban publik, pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan

optimalisasi belanja yang dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Permasalahan dalam sektor publik sangat beragam dan banyak yang dikeluhkan masyarakat, terutama soal pelayanan publik. Masyarakat mengharapkan bahwa pelayanan yang baik akan membawakan dampak yang baik pula untuk kesejahteraan mereka. Untuk menciptakan pelayanan publik yang baik maka suatu organisasi harus dapat menciptakan kondisi yang baik, tegas, teratur, dan dapat dipercaya. Pelayanan publik sangat identik dengan kinerja yang dilakukan pegawai pemerintahan daerah. Menurut Mardiasmo (2002), beberapa misi yang terkandung dalam sistem otonomi daerah adalah; *pertama*, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, *kedua*, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, *ketiga*, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka menjalankan amanat rakyat, pengelolaan keuangan Negara/Daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Untuk mewujudkannya, diperlukan pendekatan prestasi kerja dalam pengelolaan APBN/APBD, setiap alokasi biaya yang dikeluarkan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa adanya tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Realisasi yang terlihat dilapangan bahwa kinerja menjadi indikator penting suatu pemerintahan itu bisa dikatakan mampu atau tidak dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat. Salah satu kinerja yang penting dalam mendukung pelayanan publik tersebut adalah kinerja keuangan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011, disebutkan bahwa pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari; Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

Kinerja pengelola keuangan adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan pegawai yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Kinerja keuangan dibagi atas dua bagian aktivitas yaitu pelaporan keuangan dan pengelolaan keuangan. Pelaporan keuangan berhubungan dengan informasi-informasi keuangan yang telah dan akan digunakan untuk mendukung para entitas dalam pengambilan keputusan yang akan datang. Sedangkan pengelolaan keuangan berhubungan dengan aktivitas mengatur dan mengelola jalannya transaksi keuangan seperti aset, guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.

Hambatan yang sering muncul menyangkut kinerja pengelolaan keuangan adalah kurangnya pemahaman terkait tata cara pengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan yang baik adalah yang sesuai dengan peraturan dan standar akuntansi yang berlaku. Kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Persiapan Pemerintah Kota Metro menuju penerapan laporan keuangan berbasis akrual belum memadai. Untuk mendapatkan penilaian laporan keuangan yang baik, harus diawali dari ketersediaan informasi sistem akuntansi yang baik. Informasi sistem akuntansi yang andal Menurut Chenhall dan Morris (1986) adalah yang memiliki karakteristik *broad scope*, *timeliness*, *aggregation* dan *integration*. *Broad Scope* mencakup informasi mengenai permasalahan baik ekonomi maupun non ekonomi, estimasi kejadian yang mungkin terjadi dimasa serta aspekpek lingkungan. *Timeliness* merupakan informasi yang menunjukkan rentang waktu antara permohonan informasi dengan penyajian informasi yang diinginkan. Informasi yang disajikan harus tepat waktu artinya informasi tersebut harus tersedia untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuan untuk mempengaruhi keputusan. *Agregation* merupakan informasi yang

menerapkan bentuk kebijakan formal seperti *discounted cash flow*, analisis *cost-volume-profit* yang didasarkan pada area fungsional seperti pemasaran dan produksi. *Integration* mencakup aspek seperti ketentuan target atau aktivitas yang dihitung dari proses interaksi antar sub unit dalam organisasi. Penelitian Edisah (2015) menunjukkan bahwa karakteristik *broadscope*, *aggregation*, *integration*, *timeliness* berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Namun secara parsial desentralisasi tidak memoderasi hubungan antar *broadscope*, *aggregation*, *integration*, dan *timeliness*, namun secara simultan desentralisasi memoderasi pengaruh karakteristik *broadscope*, *aggregation*, *integration*, *timeliness* terhadap kinerja organisasi.

Atas dasar uraian di atas, maka penelitian ini tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial Pada SKPD Kota Metro**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah karakteristik sistem informasi akuntansi *broad scope* berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD Kota Metro?
2. Apakah karakteristik sistem informasi akuntansi *Timelines* berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD Kota Metro?
3. Apakah karakteristik sistem informasi akuntansi *Agregation* berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD Kota Metro?
4. Apakah karakteristik sistem informasi akuntansi *Integration* berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD Kota Metro?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh karakteristik sistem informasi akuntansi *broad scope* terhadap kinerja manajerial SKPD Kota Metro
2. Untuk menguji pengaruh karakteristik sistem informasi akuntansi *Timelines* terhadap kinerja manajerial SKPD Kota Metro
3. Untuk menguji pengaruh karakteristik sistem informasi akuntansi *Agregation* terhadap kinerja manajerial SKPD Kota Metro
4. Untuk menguji pengaruh sistem informasi akuntansi *Integration* terhadap kinerja manajerial SKPD Kota Metro

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Universitas

Memberikan kontribusi terhadap literatur akuntansi manajemen mengenai pengembangan teori yang berkaitan dengan peningkatan kinerja manajerial.

2. Bagi Peneliti

Sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam memahami sistem informasi akuntansi manajemen.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan sekaligus untuk memperluas pengetahuan dengan mewujudkannya sebagai referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk merumuskan masalah yang baru dalam penelitian selanjutnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan angka dalam penyajian data dan analisis yang menggunakan uji statistik. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian dengan hipotesis tertentu (Saebani, 2008). Tujuan penelitian adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara berbagai fenomena yang diselidiki. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang Pengaruh karakteristik Sistem Informasi Akuntansi (*broadscope, aggregation, integration, timeliness*) terhadap kinerja manajerial SKPD Kota Metro.